

**PERSPEKTIF LITERASI BLUE ACCOUNTING PADA
SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



DIDIK BIL IKHSAN

NIM. B1031211210

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Didik Bil Ikhsan
NIM	: B1031211210
Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan
Judul Tugas Akhir	: Perspektif Literasi Blue Accounting Pada Sektor : Pariwisata di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber Pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku.

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 Januari 2025

Didik Bil Ikhsan

NIM. B1031211210

LEMBAR YURIDIS

PERSPEKTIF LITERASI BLUE ACCOUNTING PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA

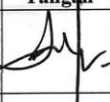
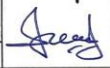
Penanggung Jawab Yuridis



Didik Bil Ikhsan
B1031211210

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 30 Desember 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Vitriyan Espa, S.E, M.S.A, Ak, C.Ht,CA. NIP. 197809062005011002	15/01/2025	
2.	Sekretaris Penguji	Umiaty Hamzani, S.E., M.Com, Ph.D NIP. 198012182003122001	15/01/2025	
3.	Penguji 1	Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP. 197901272002122002	7/01/2025	
4.	Penguji 2	Ayu Puspita Sari, S.Ak., M.Ak NIP. 199603052022032007	7/01/2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 23 JAN 2025

Koordinator Program Studi Akuntansi



Dr. Kristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Didik Bil Ikhsan
Jurusan : Akuntansi
Program studi : S1 Akuntansi
Tanggal Ujian : 30 Desember 2024

Judul Tugas Akhir :

Perspektif Literasi Blue Accounting pada Sektor Pariwisata di Indonesia

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 14 Januari 2025

Didik Bil Ikhsan
NIM. B1031211210

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perspektif Literasi Blue Accounting Pada Sektor Pariwisata di Indonesia” dengan baik. Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selama penulisan tugas akhir ini, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, CMA, CPA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Syarif M. Helmi, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Nur Fitriana Hamsyi, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik pertama dan Bapak Vitriyan Espa, S.E., M.S.A, Ak, C.Ht,CA selaku Dosen Pembimbing Akademik Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibu Umiaty Hamzani., S.E., M.M, Ph.D Ibu Rusliawati, S.E., M.Si., Ak., CA, ibu Ayu Puspita Sari, S.Ak., M.Ak selaku Dosen Penguji Tugas akhir yang telah memberikan saran dan masukannya selama ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen khususnya jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis sejak awal perkuliahan perkuliahan berlangsung hingga saat ini.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
10. Tidak Lupa saya ingin mengucapkan rasa terimakasih saya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Safaruddin. dan Ibu Dapiana. Sanak saudara dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
11. Saudara saya, Nida Syafika, terimakasih atas dukungannya.
12. Sahabat-sahabat saya, Hermanus, Monika Andreana Sary, Khalifah Lusi Kartini, Angela Widia Rianti, Satria Tsani Azkiya, Dayro Carolus Barus, Berlian Ernita Putri.
13. Teman-teman seperjuangan Mikael, Dean Tuqo, Nabil, Ulfah, Galuh, Khairunnisa, Dhania, Adira, Vivvy, Farradesty, Novi, Ajeng, Adzra.
14. Teman-teman kelas Akuntansi E yang senantiasa memberikan kenangan di masa kuliah ini dan sudah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Rekan-rekan seperjuangan akuntansi angkatan 2021, kakak-kakak dan adik-adik jurusan akuntansi.
16. Berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna peningkatan pembuatan tugas akhir pada waktu mendatang

Pontianak, 14 Januari 2025

Didik Bil Ikhsan

NIM. B1031211210

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran pemerintah, dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir di Indonesia melalui pendekatan Blue Accounting. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis literatur terhadap dua puluh lima artikel yang relevan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan utama, peran pemerintah, dan pemahaman pemangku kepentingan dalam menerapkan Blue Accounting. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam mengembangkan peraturan, mengkoordinasikan upaya konservasi, dan melibatkan para pemangku kepentingan. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap Blue Accounting dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan telah terbukti efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya peraturan yang kuat, pendidikan publik, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Implikasi praktisnya adalah perlunya pengembangan model akuntansi biru yang lebih terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan Blue Accounting berbasis data dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya.

Kata Kunci : Blue accounting, literasi, tantangan, pemahaman stakeholders, peran pemerintah.

ABSTRACT

This research aims to analyze the challenges, role of government, and understanding of stakeholders in managing marine and coastal resources in Indonesia through the Blue Accounting approach. This research uses qualitative methodology with literature analysis of twenty-five relevant articles. The data was analyzed to identify the main challenges, government role, and stakeholder understanding in implementing Blue Accounting. Management of marine and coastal resources in Indonesia faces various challenges, including inadequate infrastructure and low public awareness. The government's role is critical in developing regulations, coordinating conservation efforts, and involving stakeholders. Stakeholder understanding of Blue Accounting and multi-stakeholder collaboration have proven effective in overcoming these challenges and improving resource welfare. This research provides insight into the importance of strong regulation, public education, and collaboration between governments, communities, and the private sector in the management of marine and coastal resources. The practical implications are the need to develop a blue accounting model that is more integrated with information and communication technology to improve the effectiveness of environmental monitoring and management. The study emphasizes the importance of data-based Blue Accounting approaches and multi-stakeholder collaboration in marine and coastal resource management, which has not been much applied in previous research.

KEYWORDS : *blue accounting, literacy, challenges, understanding stakeholders, role of government*

PERSPEKTIF LITERASI BLUE ACCOUNTING PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Literasi adalah kemampuan yang tidak hanya mencakup membaca dan menulis, tetapi juga berpikir kritis dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi, termasuk data digital. Dalam konteks Blue Accounting, literasi menjadi fondasi untuk pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, khususnya di sektor pariwisata Indonesia. Blue Accounting sendiri adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, guna mendorong pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Blue Accounting berakar dari konsep ekonomi biru yang menitikberatkan pada pembangunan berbasis keberlanjutan. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, termasuk dalam sektor pariwisata. Namun, penerapan konsep ini di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia serta keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran pemerintah, dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap konsep Blue Accounting. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian lingkungan di sektor pariwisata. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur dan praktik di bidang akuntansi berbasis lingkungan.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama:

- Apa saja tantangan utama dalam menerapkan Blue Accounting di sektor pariwisata Indonesia?

- Bagaimana pemahaman para pemangku kepentingan terhadap konsep Blue Accounting?
- Apa peran pemerintah dalam mendukung penerapan Blue Accounting?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data sekunder dari artikel-artikel terdahulu dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan tema seperti tantangan, pemahaman pemangku kepentingan, dan peran pemerintah. Analisis dilakukan untuk menemukan pola, manfaat, serta dampak dari penerapan Blue Accounting.

4. Hasil

1. Tantangan

Penerapan Blue Accounting di sektor pariwisata Indonesia menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja. Selain itu, persoalan seperti degradasi lingkungan, kegiatan ilegal, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah semakin memperburuk situasi, menghambat upaya pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

2. Pemahaman Pemangku Kepentingan

Pemahaman pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan literasi lingkungan dan praktik keberlanjutan. Kolaborasi ini mencakup pengumpulan data, sosialisasi, dan program pendidikan yang mampu mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian sumber daya alam, khususnya di kawasan pesisir.

3. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan regulasi, memastikan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan publik. Langkah-langkah pemerintah ini bertujuan

menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang lebih efektif dan berkelanjutan. Peran pemerintah juga mencakup penyediaan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian ekosistem laut dan pesisir.

5. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Blue Accounting di sektor pariwisata Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sumber daya manusia serta finansial. Namun, pemahaman yang baik dari pemangku kepentingan dan peran proaktif pemerintah dalam membuat regulasi, memberikan pendidikan publik, serta membangun kolaborasi lintas sektor telah menunjukkan potensi besar untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pendekatan berbasis data dan partisipasi multipihak terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Blue Accounting, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan mengembangkan model pengelolaan yang lebih terintegrasi dengan teknologi informasi untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat melalui pendekatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam pelestarian lingkungan pesisir. Penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas juga diperlukan untuk memperkaya wawasan dan solusi terkait pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	ii
LEMBAR YURIDIS	Error! Bookmark not defined.
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Literasi.....	6
2.2 Blue Accounting.....	6
BAB III METODE PENELITIAN	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
4.1 Hasil Penelitian	10
4.1.1 Tantangan Utama	10
4.1.2 Pemahaman Pemangku Kepentingan.....	13
4.1.3 Peran Pemerintah	20
BAB V PENUTUP	24
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	24
5.3 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

LAMPIRAN.....	29
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Pengelompokan objek penelitian dan wilayah penelitian.....	8
TABEL 2. Pengelompokan Rumusan Masalah.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 LETTER OF ACCEPTANCE	30
LAMPIRAN 2 SERTIFIKAT ARTIKEL	31
LAMPIRAN 3 ARTIKEL	32
LAMPIRAN 4 SERTIFIKAT MBKM RISET	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, menciptakan, mengkomunikasikan, menghitung, dan menggunakan dan tertulis dalam kaitannya dengan berbagai tujuan dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas dan masyarakat (A'yuni, 2015). Gilster menjelaskan bahwa konsep literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca tetapi membaca dengan makna dan pemahaman. dengan makna dan pemahaman. Literasi digital mencakup penguasaan ide, bukan penekanan tombol. Jadi, Gilster menekankan pada proses berpikir kritis ketika berhadapan dengan media digital daripada kompetensi teknis sebagai keterampilan inti dalam literasi digital, serta menekankan evaluasi kritis terhadap apa yang ditemukan melalui media digital daripada keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengakses media digital. Gilster mendefinisikan bahwa selain seni berpikir kritis, kompetensi yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk belajar bagaimana mengorganisir pengetahuan, serta membangun sekumpulan informasi yang dapat diandalkan dari beberapa sumber yang berbeda. (Gilster & Glistter, 1997)

Di era digital yang semakin maju, literasi menjadi kunci penting dalam mendukung pemahaman konsep *blue accounting* di Indonesia. Literasi tidak lagi berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap informasi yang ditemukan, termasuk informasi digital dan non-digital. informasi yang ditemukan, termasuk media digital dan non-digital. Dalam konteks *blue accounting*, literasi dapat menjadi fondasi dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Menggabungkan perspektif literasi akuntansi dengan *blue accounting* dapat membantu memungkinkan pengembangan pengetahuan yang dapat diandalkan dari berbagai sumber serta kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis yang

dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Gagasan *blue accounting*, yang memberikan panduan untuk mengelola dan melaporkan sumber daya air secara transparan dan berkelanjutan, sangat penting bagi literasi dalam konteks kapasitas untuk memahami dan menerapkan informasi. Pendekatan literasi memastikan bahwa data dan informasi mengenai kondisi dan pemanfaatan sumber daya dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari manajer hingga masyarakat umum. Tingkat literasi yang kuat dapat mendorong akuntabilitas, keterbukaan, dan daya tarik dalam Blue Akuntansi dengan memfasilitasi kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang terdidik. Bersama-sama, mereka membangun fondasi yang kuat untuk pelaporan yang transparan, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Blue accounting sendiri merupakan turunan dari ekonomi biru, yang mencakup pembangunan ekonomi berbasis lahan dan laut yang berkelanjutan seperti pengembangan wilayah pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor pariwisata pesisir. Secara umum, fokus ekonomi biru dimulai dari tahun 2013 hingga 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan. Pengukuran keberhasilan pembangunan berkelanjutan dilihat dari keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. (Syah et al., 2020)

Dalam penelitian (Syah et al., 2020) menyoroti pentingnya mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dalam akuntansi untuk mendukung keputusan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya akuntansi konvensional berevolusi untuk memasukkan data tentang dampak lingkungan, terutama pada ekosistem laut, untuk mencegah konflik dan kerusakan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana, dan menekankan bahwa informasi non-keuangan harus dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Pernyataan Syah sejalan dengan penelitian (Abreu et al.,

2019) yang mengatakan bahwa "Akuntansi biru akan berkembang dengan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dikaitkan dengan lebih dari sekedar akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena berkaitan dengan penilaian dan pelaporan itu sendiri yang berusaha membantu para ahli dalam aspek-aspek tertentu dari proses degradasi, penggunaan kembali, dan kerusakan oleh percepatan yang luar biasa dari proses pembongkaran selama beberapa tahun terakhir".

Penelitian (Syah et al., 2020) merekomendasikan pengembangan konsep *blue accounting* yang dapat diimplementasikan melalui peraturan di tingkat kementerian atau daerah, untuk membantu mengelola ekosistem laut dan berkontribusi dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi dasar penelitian ini, dengan menekankan pada upaya mitigasi kerusakan yang terjadi, maka konsep keberlanjutan dapat diterapkan tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi yang akan datang atas tindakan yang dilakukan pada generasi saat ini.

Menurut (Prayuda, 2020) ia mengatakan konsep ekonomi biru dalam jangka panjang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya laut. "Pertumbuhan biru adalah istilah yang relatif baru yang dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya laut, sementara pada saat yang sama mencegah degradasi, pemanfaatan yang berlebihan, dan polusi" (Boonstra et al., 2018). (Prasetyo, 2020) menyatakan bahwa perumusan akuntansi kelautan dan perikanan mengintegrasikan konsekuensi ekonomi dari pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati laut, hal ini berarti dalam akuntansi kelautan dan perikanan, dampak ekonomi dari upaya pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut juga diperhitungkan. Hal ini memastikan bahwa aspek lingkungan masuk dalam perhitungan ekonomi untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menganalisis sejauh mana literasi akuntansi biru, baik dari segi tantangan yang dihadapi, peran pemerintah, dan pemahaman para pemangku kepentingan, memengaruhi implementasi dan

efektivitas praktik tersebut di berbagai sektor maritim. Penelitian ini akan membantu pemahaman di berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, Pemerintah, dan masyarakat sipil yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan. Berdasarkan pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja tantangan utama dalam menerapkan akuntansi biru di sektor pariwisata di Indonesia?
2. Bagaimana para pemangku kepentingan pariwisata memahami konsep akuntansi biru?
3. Apa peran pemerintah dalam mendukung penerapan *blue accounting* di sektor pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran pemerintah, dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir di Indonesia melalui pendekatan *Blue Accounting*. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis literatur terhadap dua puluh lima artikel yang relevan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan utama, peran pemerintah, dan pemahaman pemangku kepentingan dalam menerapkan *Blue Accounting*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait *blue accounting* dengan menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Dengan mengintegrasikan konsep keberlanjutan, literasi lingkungan, dan keterlibatan masyarakat, penelitian ini memperkaya wawasan teoretis mengenai akuntansi berbasis lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Penekanan pada regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta pendidikan publik memberikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala seperti infrastruktur yang buruk, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya keuangan maupun manusia.